



Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nurina Zhafira¹, Enan Trivansyah Sastri²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

Email: ¹nurinazhafira121@gmail.com, ²dosen00004@unpam.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 membawa perubahan terhadap dunia termasuk Indonesia dengan berbagai tantangan bahkan menghadirkan berbagai kebijakan baru, menyebabkan berbagai dampak salah satunya dampak terhadap sektor ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi penelitian realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun 2017- 2021 sebanyak 45 data. Jumlah sampel yang diperoleh dengan teknik pengambilan sampel jenuh adalah sebanyak 9 kabupaten dan kota dengan pengamatan selama 5 tahun dengan periode 2017-2021. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Alat uji yang digunakan untuk menguji data adalah uji analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews versi 12. Serangkaian uji yang dilakukan menghasilkan data yang dapat membuktikan bahwa secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif, sementara dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

Abstract

The COVID-19 pandemic has brought changes to the world including Indonesia with various challenges and even presents various new policies, causing various impacts, one of which is the impact on the economic sector. This study aims to determine the effect of local taxes, local levies and special allocation funds on capital expenditure. This study uses a quantitative method with a research population of 45 data on the realization of district and city APBDs in Bali Province in 2017-2021. The number of samples obtained using the saturated sampling technique is 9 districts and cities with observations for 5 years with the period 2017-2021. The data collection techniques in this research are literature study and documentation study. The test tool used to test the data is the panel data regression analysis test using Eviews version 12. A series of tests conducted produces data that can prove that partially local taxes and local retribution have a significant and positive effect, while special allocation funds have no effect on capital expenditure. While simultaneously local taxes, local levies and special allocation funds affect capital expenditure.

Keywords: Land Taxes, Local Retribution, Special Allocation Funds, Capital Spending.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 membawa perubahan terhadap dunia termasuk Indonesia dengan berbagai tantangan bahkan menghadirkan berbagai kebijakan baru untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 menyebabkan berbagai dampak salah satunya dampak terhadap sektor ekonomi. Bali terkenal dengan keindahan alam, keasrian dan budayanya yang masih terjaga hingga kini. Dengan jumlah wisatawan domestik yang tembus 10 juta orang pada tahun 2019 dan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan hingga tahun 2019, menjadikan Bali sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia pada sektor pariwisata. Maka dari itu, perekonomian Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata serta

turunannya. Pada periode 2016-2019, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali berada diatas angka 50%, namun dampak adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 turun menjadi 40,99%. Berdasarkan hasil statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Bali, kondisi ini merupakan titik terendah sepanjang periode 2016-2020.

Tabel 1. Realisasi APBD Provinsi Bali

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi Dana Alokasi Khusus	Realisasi Belanja Modal
2017	2.872.354.213	46.431.882	1.105.556.047	660.432.833
2018	3.230.732.170	40.241.780	1.042.840.036	440.710.162
2019	3.463.996.394	33.841.783	1.095.683.760	556.754.503
2020	2.607.990.397	18.966.859	1.153.039.546	458.448.887
2021	2.458.530.859	14.298.569	1.413.066.578	839.010.470

Pajak turut memegang peranan penting terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Kepala KPP Madya Denpasar Agus Kuncara menyatakan bahwa COVID-19 turut berdampak pada penerimaan pajak daerah sehingga minus 30,25% pada tahun 2020 dan membaik pada tahun selanjutnya menjadi minus 18,95%. Pada tahun 2020 Kepala KPP Pratama Gianyar Moch Luqman Hakim menjelaskan bahwa pandemi menyebabkan sektor perdagangan besar dan eceran serta akomodasi sebagai sektor penyumbang penerimaan terbesar KPP Pratama Gianyar bergeser. Sedangkan pada tahun selanjutnya penyumbang pajak terbesar adalah sektor konstruksi ditunjang oleh pembangunan infrastruktur seperti Bendungan Sidan. Kepala KPP Pratama Gianyar Moch Luqman Hakim juga menggambarkan pada tahun 2020 penurunan penerimaan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 48,93% dari tahun sebelumnya. Pada Oktober 2021 KPP Pratama Gianyar mencatat penerimaan mencapai 75,88%.

Penelitian terhadap belanja modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnani & Istihika (2017) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan semakin tingginya pendapatan dari pajak daerah maka akan diikuti dengan semakin meningkatnya anggaran untuk belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan Pratama, dkk. (2021) dan Marni, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianto & Putri (2021) yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian Mulyati (2019) mendapatkan hasil bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Tidak sejalan dengan penelitian Murti & Trisnawati (2021) yang menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dalam penelitian Kuntandi, dkk. (2022) menyatakan bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2020) menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus sebagai sumber pendapatan daerah terhadap belanja modal pada tahun 2017-2021. Pemilihan tahun 2017-2021 ditujukan agar penelitian dapat relevan dengan kondisi saat ini. Berlandasan hal tersebut, penulis mengambil judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021)”

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal? 2) Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal? 3) Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal? 4) Apakah pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal?. Adapun tujuan penelitian diatas adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal 2) Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal 3) Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal 4) Untuk mengetahui pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

METODE

Menurut Sihite dan Holiawati (2017:83) “Secara umum, teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak dalam suatu perusahaan yaitu prinsipal dan agen”. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa ada hubungan kerja antara prinsipal dan agen. Teori keagenan menganalisis susunan

kontraktual diantara dua pihak, pihak prinsipal membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan harapan pihak agen akan bertindak seperti yang diharapkan. Dalam organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah. Teori keagenan ini dipraktikkan, termasuk pemerintah daerah di Indonesia, terutama ketika otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah. Teori keagenan dalam pemerintahan antara pemerintah daerah yang mewakili rakyat dan legislatif, pemerintah daerah merupakan agen dan legislatif sebagai prinsipal. Terdapat perbedaan kepentingan pada teori ini antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu memberikan yang terbaik bagi kepentingan pihak prinsipal. Pihak agen harus mampu mengembangkan suatu daerah dan menyejahterakan rakyat. Pemerintah pusat sebagai prinsipal mengawasi pembayaran pajak secara rutin agar pemerintah daerah sebagai agen dapat menggunakan iuran pajak untuk memfasilitasi berbagai kegiatan publik yang secara tidak langsung didapatkan sebagai bentuk tanggungjawab.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Creswell, metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel yang biasanya diukur dengan instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Kusumatuti, dkk., 2020). Variabel dependen variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan belanja modal. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini merupakan pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus.

Sampel penelitian yang digunakan merupakan sampel jenuh sehingga semua populasi digunakan sebagai sampel. Sampel penelitian ini terdiri dari Laporan Realisasi atas Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Daerah yang berjumlah 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan periode 5 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai 2021, sehingga sampel yang dihasilkan berjumlah 45 data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dilakukan dengan cara melakukan kajian pustaka melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal dan sumber lain. Teknik pengumpulan data juga menggunakan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari literatur laporan realisasi APBD. Sumber data penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti atau lembaga dan dipublikasikan secara luas.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel. Menurut Santy, dkk. (2020) data panel adalah data yang memiliki jumlah cross section dan jumlah time series. Pengujian data dilakukan menggunakan *software* statistik komputer Eviews 12. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* (Basuki & Prawoto, 2016). Rumus yang digunakan pada bentuk model regresi data panel dalam penelitian ini yaitu:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Y = Belanja modal
 α = Konstanta
 β = Koefisien regresi
X1 = Pajak daerah
X2 = Retribusi daerah
X3 = Dana alokasi khusus
i = Cross section
t = Time series
e = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 03/06/23
Time: 14:14
Sample: 2017 2021

	Y	X1	X2	X3
Mean	265.2982	496.5007	33.40778	177.4067
Median	204.3100	116.0000	23.00000	158.5800

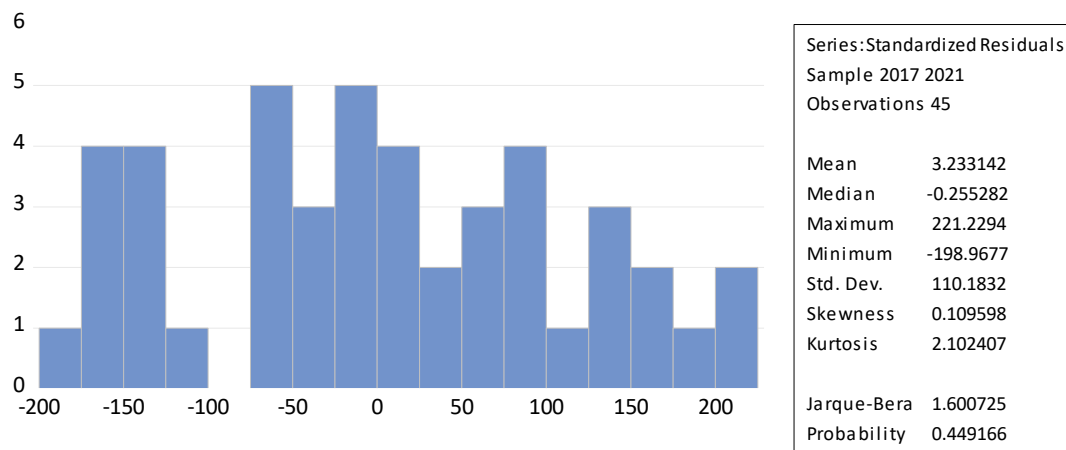
Maximum	1241.110	4217.320	148.0500	320.5500
Minimum	57.14000	16.63000	8.280000	90.87000
Std. Dev.	226.0511	974.5619	32.74680	59.25479
Skewness	2.639023	2.891340	2.346807	0.648515
Kurtosis	10.59243	10.43336	7.857077	2.544103
Jarque-Bera	160.3176	166.3016	85.53975	3.543990
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.169993
Sum	11938.42	22342.53	1503.350	7983.300
Sum Sq. Dev.	2248361.	41789921	47183.53	154489.7
Observations	45	45	45	45

Dapat disimpulkan dari Tabel 2. diatas kolom observations menunjukkan jumlah data yang diteliti yaitu 45 sampel. Nilai maksimum pada belanja modal sebesar 1241.110 yang dimiliki oleh Kabupaten Badung tahun 2017 dan nilai minimum sebesar 57.14000 yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli tahun 2020. Belanja modal memiliki rata-rata positif sebesar 265.2982 dengan arti bahwa belanja modal diterima secara positif. Nilai standar deviasi belanja modal yaitu 226.0511.

Nilai maksimum pajak daerah sebesar 4217.320 yang dimiliki oleh Kabupaten Badung tahun 2019. Nilai minimum pajak daerah sebesar 16.63000 yang dimiliki oleh Kabupaten Bangli tahun 2017. Rata-rata pajak daerah yang dimiliki 45 data menunjukkan hasil yang positif sebesar 496.5007 yang berarti secara umum pajak daerah diterima secara positif. Nilai standar deviasi pajak daerah 974.5619.

Nilai maksimum retribusi daerah sebesar 148.0500 yang dimiliki oleh Kabupaten Badung tahun 2019. Nilai minimum retribusi daerah sebesar 8.280000 yang dimiliki oleh Kabupaten Jembrana tahun 2021. Rata-rata retribusi daerah yang dimiliki 45 data menunjukkan hasil yang positif sebesar 33.40778 yang berarti secara umum retribusi daerah diterima secara positif. Nilai standar deviasi retribusi daerah 32.74680.

Nilai maksimum dana alokasi khusus sebesar 320.5500 yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng tahun 2017. Nilai minimum dana alokasi khusus sebesar 90.87000 yang dimiliki oleh Kabupaten Jembrana tahun 2020. Rata-rata dana alokasi khusus yang dimiliki 45 data menunjukkan hasil yang positif sebesar 177.4067 yang berarti secara umum dana alokasi khusus diterima secara positif. Nilai standar deviasi dana alokasi khusus 59.25479.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal. Kriteria pengambilan keputusan yaitu data berdistribusi normal jika nilai probabilitas lebih dari 0,05. Berdasarkan Gambar 1. diatas menunjukkan nilai probabilitas uji normalitas sebesar $0,449166 > 0,05$ maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi secara normal dikarenakan hasil uji lebih dari taraf yang sudah ditetapkan.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	LX2	X3
X1	1.000000	0.759437	-0.150335
LX2	0.759437	1.000000	-0.016120
X3	-0.150335	-0.016120	1.000000

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui dua atau lebih variabel independen yang saling berkorelasi. Multikolinearitas tidak terjadi apabila nilai kolerasi antar semua variabel bebas $< 0,90$. Pada pengolahan data diatas dilakukan transformasi data pada variabel retribusi daerah. Hasil dari Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai kolerasi dibawah 0,90 dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 03/06/23 Time: 14:23

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 45

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.324739	0.147586	-2.200336	0.0926
X2	12.84212	4.762365	2.696585	0.0543
X3	-0.365823	0.344401	-1.062202	0.3480
C	57.58373	50.95063	1.130187	0.3216
Weighted Statistics				
Root MSE	149.3686	R-squared	0.589875	
Mean dependent var	299.0855	Adjusted R-squared	0.559866	
S.D. dependent var	232.8414	S.E. of regression	156.4853	
Sum squared resid	1003994.	F-statistic	19.65648	
Durbin-Watson stat	2.052270	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.607029	Mean dependent var	264.8986	
Sum squared resid	1034808.	Durbin-Watson stat	2.194004	

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini merupakan nilai probabilitas, apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi terbaik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada Tabel 4. hasil dari uji heteroskedastisitas yaitu nilai probabilitas pajak daerah sebesar 0.0926, nilai probabilitas retribusi daerah sebesar 0.0543 dan nilai probabilitas dana alokasi khusus sebesar 0.3480. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Auto Korelasi

Unweighted Statistics

R-squared	0.754656	Mean dependent var	265.2982
Sum squared resid	551621.6	Durbin-Watson stat	1.167402

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat ada atau tidaknya masalah autokorelasi. Uji ini menggunakan metode Durbin Watson dengan tolak ukur nilai Durbin-Watson stat. Berdasarkan Tabel 5. nilai Durbin-Watson stat sebesar 1.167402 sedangkan diketahui bahwa. Dengan kriteria pengukuran $-2 < 1.167402 < 2$ ditentukan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Unweighted Statistics

R-squared	0.754656	Mean dependent var	265.2982
Sum squared resid	551621.6	Durbin-Watson stat	1.167402

Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 6. nilai R-squared sebesar 0.754656 maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus menjelaskan belanja modal sebesar 75,5%, sedangkan sisanya sebesar 24,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Tabel 7. Hasil Uji F
Weighted Statistics

Root MSE	109.0001	R-squared	0.618307
Mean dependent var	364.5181	Adjusted R-squared	0.590379
S.D. dependent var	202.1131	S.E. of regression	114.1934
Sum squared resid	534645.6	F-statistic	22.13876
Durbin-Watson stat	1.417634	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil pada Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai Fstatistik sebesar 22.13876 dan Ftabel yang diperoleh dari $df_1 = 4-1 = 3$ dan $df_2 = 45-4 = 41$ memperoleh nilai sebesar 2.833. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $F_{statistik} 22.13876 > 2.833$ dan nilai probabilitas sebesar $0.000000 < 0.05$ maka H_a diterima yang berarti pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Bali.

Tabel 8. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.175292	0.034044	5.148981	0.0067
X2	0.619812	0.537093	1.154012	0.3128
X3	0.640135	0.132962	4.814438	0.0086
C	34.41013	41.32455	0.832680	0.4519

Hasil dari Tabel 8. maka nilai ttabel diperoleh dari $df = 45-4 = 41$ sehingga menghasilkan nilai sebesar 2.01954. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- 1) Nilai tstatistik pajak daerah sebesar 5.148981 lebih besar dari ttabel 2.01954 dan nilai probabilitas pajak daerah sebesar 0.0067, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan 0.05. Maka dapat dinyatakan bahwa H_{a1} diterima atau disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap belanja modal.
- 2) Nilai tstatistik retribusi daerah sebesar 1.154012 lebih kecil dari ttabel 2.01954 dan nilai probabilitas retribusi daerah sebesar 0.3128, nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0.05. Maka dapat dinyatakan bahwa H_{o2} diterima atau disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
- 3) Nilai tstatistik dana alokasi khusus sebesar 4.814438 lebih besar dari ttabel 2.01954 dan nilai probabilitas dana alokasi khusus sebesar 0.0086, nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. Maka dapat dinyatakan bahwa H_{a3} atau disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap belanja modal.

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada penelitian ini dapat diterima. Hipotesis ini didukung dalam Tabel 8. dengan nilai tstatistik pajak daerah sebesar 5.148981 lebih besar dari ttabel 2.01954 ($5.148981 > 2.01954$) dan nilai probabilitas pajak daerah

sebesar $0.0067 < 0.05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kuntandi, dkk. (2022) dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pendapatan asli daerah yang secara langsung mempengaruhi pembangunan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah sehingga dapat meningkatkan belanja modal.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada penelitian ini ditolak. Hal ini didukung dalam hasil penelitian pada Tabel 8. dengan nilai tstatistik retribusi daerah sebesar 1.154012 lebih kecil dari ttabel 2.01954 ($1.154012 < 2.01954$) dan nilai probabilitas retribusi daerah sebesar $0.3128 > 0.05$ sehingga dinyatakan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santy, dkk. (2020). Hal ini berarti penerimaan retribusi daerah masih belum dapat menjadi sumber yang mempengaruhi peningkatan pembangunan daerah. Pengelolaan retribusi daerah tidak dilakukan dengan baik sehingga perubahan terhadap retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal dalam penelitian ini diterima. Hal ini didukung dalam hasil penelitian pada Tabel 8. dengan nilai tstatistik dana alokasi khusus sebesar 4.814438 lebih besar dari ttabel 2.01954 ($4.814438 > 2.01954$) dan nilai probabilitas dana alokasi khusus sebesar $0.0086 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Juniawan & Suryantini (2018) dan Alpi & Sirait (2022), hasil tersebut menyatakan bahwa dana alokasi khusus digunakan sesuai fungsinya yaitu untuk membiayai aktivitas-aktivitas pemerintahan yang bersifat prioritas sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan perekonomian daerah.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal dalam penelitian ini diterima. Hal ini didukung dalam hasil penelitian pada Tabel 7. dengan nilai Fstatistik 22.13876 yang lebih besar dari Ftabel 2.833 dan nilai probabilitas sebesar $0.000000 < 0.05$ dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Sudika & Budiarta (2017). Hal ini dapat disebabkan oleh pajak daerah yang mencerminkan kemaidiran sebuah daerah didukung retribusi daerah dan dana alokasi khusus sehingga mampu mempengaruhi belanja modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari uji, analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
- 2) Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
- 3) Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
- 4) Pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Dalam penelitian yang dilakukan adapun beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yaitu:

- 1) Penelitian hanya menggunakan sampel data Laporan Realisasi atas Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021
- 2) Penelitian kurang mengeksplor karena hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus, dengan satu variabel dependen yaitu belanja modal.
- 3) Pada model penelitian ini pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus menjelaskan belanja modal sebesar 75,5%, sedangkan sisanya sebesar 24,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel bebas dan memperpanjang periode penelitian sehingga menambah jumlah sampel yang akan diolah.
- 2) Pemerintah daerah memberikan sosialisasi regulasi atas retribusi daerah yang dipungut dan melakukan pengawasan terhadap penerimaan retribusi daerah.
- 3) Masyarakat diharapkan mampu memahami regulasi retribusi daerah sehingga realisasi retribusi daerah dapat terpenuhi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F., & Sirait, R. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–13. <https://doi.org/https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Basuki, Agus Tri, And Nano Prawoto. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi Spss & Eviews. Jakarta: Rajawali Pers., 2016.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 335–341. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045>
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 7(3), 1255–1281. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJMUNUD>
- Kuntandi, C., Pamungkas, A., Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2(3), 269–280. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3>
- Kusumatuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, And Taofan Ali Achmadi. Metode Penelitian Kuantitatif. Sleman: Deepublish, 2020.
- Marni, Suryana, A. K. H., & Pratiwi, Y. N. D. (2022). Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten / Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019. 10(1), 37–48.
- Mulyati, S. (2019). Effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Regional Retribution on Allocation of Batam City Government Capital Expenditures 2013-2017. *Measurement*, 13(1), 11–18. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1790>
- Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, dan DAK pada Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 105–119. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p105-119>
- Pratama, S. A., Kristiyanti, L., & Pardanawati, S. L. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 748–751. <https://doi.org/https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Pudjut Harianto, R., & Putri, C. A. S. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(2), 244–259. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i2.153>
- Santy, D., Amir, A., & Wahyudi, I. (2020). The Effect of Regional Tax Revenue, Regional Retribution and Revenue Sharing Funds on Regency / City Capital Expenditure in Jambi Province 2013 - 2017. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(3), 203–212. <https://doi.org/https://online-journal.unja.ac.id/jaku> e-ISSN
- Sihite, R. N., & Holiawati. (2017). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 9(2), 81–92. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9231>
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1689–1718. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p30>
- Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *JurJurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jai.11.1.%p>